Research Review
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 4, No. 1, Juli 2025 ISSN: 29622743

Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Utang Publik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi

(Fiscal Policy and Public Debt Management: Challenges and Opportunities in The Era of Globalization)

M. Iqbal Febriansyah[1], Adrian Kurnia Sobana Putra[2], Muh. Tsaqif Rafii[3], W Pangestoeti[4]
[1,2,3,4]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
2305020079@student.umrah.ac.id[1], akurniasobanaputra@student.umrah.ac.id[2], mtsaqifrafii@student.umrah.ac.id[3] , wahjoepangestoeti@umrah.ac.id[4]

Article Info

Article history:

Received: 4 Juli 2025
Revised: 23 Juli 2025
Accepted: 24 Juli 2025

Keywords:

Fiscal Policy
Public Debt
Globalization
SWOT Analysis
Innovative Financing

Kata Kunci:

Kebijakan Fiskal
Utang Publik
Globalisasi
Analisis SWOT
Pembiayaan Inovatif

Abstract

This study investigates the challenges and opportunities associated with fiscal policy and public debt management in Indonesia during the globalization era, with a particular focus on the 2021–2025 period. Employing a qualitative descriptive approach and SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis, the research aims to evaluate the effectiveness and resilience of Indonesia's fiscal strategies amid rapidly shifting global economic conditions. The findings highlight several internal strengths, including the maintenance of macroeconomic stability, prudent fiscal discipline, and efforts to diversify financing sources. However, the study also uncovers significant weaknesses, such as Indonesia's persistently low tax ratio, inefficient state spending, and the limited capacity of sub-national governments to manage fiscal responsibilities effectively. Externally, globalization presents both opportunities and threats. Opportunities include access to global financial markets, the potential for green financing (e.g., green bonds and SDG bonds), and digital transformation in fiscal governance. On the other hand, threats such as global market volatility, rising interest rates, currency risks, and geopolitical tensions pose serious challenges to fiscal sustainability. The study emphasizes the need for adaptive and forward-looking fiscal policies that can respond to external shocks while maintaining national development priorities. Key policy recommendations include accelerating tax reform, implementing risk-based public debt governance, enhancing synergy between central and regional governments, and strengthening institutional capacity. These measures are crucial to ensure long-term fiscal resilience and support Indonesia's aspiration to achieve its Golden Indonesia 2045 vision — a future characterized by inclusive growth, economic competitiveness, and sustainable development.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan dan peluang dalam kebijakan fiskal serta pengelolaan utang publik di Indonesia pada era globalisasi, dengan fokus khusus pada periode 2021–2025. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas serta ketahanan strategi fiskal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Temuan menunjukkan beberapa kekuatan internal, seperti stabilitas makroekonomi yang terjaga, disiplin fiskal yang hati-hati, dan upaya diversifikasi sumber pembiayaan. Namun, terdapat pula kelemahan signifikan, seperti rasio pajak yang masih rendah, inefisiensi dalam belanja negara, serta keterbatasan

kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola tanggung jawab fiskal secara efektif. Secara eksternal, globalisasi menghadirkan peluang sekaligus ancaman. Peluang meliputi akses ke pasar keuangan global, potensi pembiayaan hijau (misalnya green bond dan obligasi SDG), serta transformasi digital dalam tata kelola fiskal. Sebaliknya, ancaman seperti volatilitas pasar global, kenaikan suku bunga, risiko nilai tukar, dan ketegangan geopolitik menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan fiskal. Studi ini menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang adaptif dan visioner untuk merespons guncangan eksternal tanpa mengabaikan prioritas pembangunan nasional. Rekomendasi kebijakan utama mencakup percepatan reformasi perpajakan, penerapan tata kelola utang publik berbasis risiko, penguatan sinergi pusat-daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin ketahanan fiskal jangka panjang dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 — masa depan yang ditandai oleh pertumbuhan inklusif, daya saing ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Corresponding Author:

M. Iqbal Febriansyah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
2305020079@student.umrah.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Di era globalisasi, perekonomian suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh kondisi ekonomi dan geopolitik dunia yang terus berubah. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2025 dengan fokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini dirancang untuk menghadapi tantangan berat sekaligus memanfaatkan peluang besar yang muncul dari perubahan global, dengan tujuan memperkuat perekonomian nasional secara berkelanjutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Salah satu aspek krusial dalam kebijakan fiskal adalah pengelolaan utang publik yang harus dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani perekonomian di masa depan. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan defisit anggaran yang mendekati batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan rasio utang yang diperkirakan meningkat mendekati level saat pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan kebutuhan pembiayaan yang besar, namun juga menimbulkan risiko fiskal yang harus dikelola secara efektif agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal (Nugraha & Theodora, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan utang publik menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam rangka mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif.

Tantangan pengelolaan utang publik di era globalisasi juga dipengaruhi oleh volatilitas nilai tukar dan risiko eksternal yang dapat memperberat beban pembayaran utang, terutama utang dalam mata uang asing. Sekitar 29 persen utang pemerintah Indonesia adalah utang luar negeri, sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat meningkatkan kewajiban pembayaran utang secara signifikan (Mabbruroh et al., 2023). Pemerintah merespons hal ini dengan strategi pembiayaan yang beragam, termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman luar negeri yang selektif, serta mekanisme restrukturisasi utang untuk mengelola risiko fiskal secara lebih efisien (Detik Finance, 2024). Strategi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan pengendalian risiko fiskal.

Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Koordinasi antara Menteri Keuangan dan Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga defisit fiskal dalam batas yang aman sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang prudent dan transparan juga berperan dalam memperkuat kepercayaan investor, yang tercermin dari tingginya minat pasar terhadap instrumen utang pemerintah pada tahun 2025 (Wildan, 2025). Hal ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Peluang di era globalisasi juga terbuka lebar melalui pengembangan pasar keuangan domestik dan instrumen pembiayaan yang inovatif. Pemerintah mendorong diversifikasi sumber pembiayaan dan penggunaan instrumen keuangan yang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi pengelolaan utang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang semakin ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik dan investor, sekaligus memastikan bahwa pembiayaan utang digunakan untuk kegiatan yang produktif dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024), Dengan demikian, pengelolaan utang publik tidak hanya menjadi beban, tetapi juga peluang untuk mempercepat pembangunan nasional.

Era globalisasi juga menuntut reformasi struktural dalam kebijakan fiskal agar mampu beradaptasi dengan perubahan cepat di tingkat global dan domestik. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai reformasi, termasuk efisiensi anggaran dan reformasi perpajakan, untuk menciptakan ruang fiskal yang sehat dan mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang. Upaya ini mencakup pengurangan belanja non-prioritas, peningkatan belanja modal, serta optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien (Pramesti et al., 2025). Dengan kebijakan fiskal yang efektif, Indonesia dapat memperkuat fondasi ekonomi untuk menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang pertumbuhan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan fiskal dan pengelolaan utang publik di Indonesia, khususnya dalam konteks tantangan dan peluang yang muncul di era globalisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai secara optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah instrumen ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna memengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kesempatan kerja. Kebijakan ini meliputi pengelolaan pajak, belanja pemerintah, dan utang negara untuk mencapai tujuan makroekonomi. Menurut Keynes (1936), kebijakan fiskal berperan penting dalam menstabilkan ekonomi, terutama saat resesi, dengan meningkatkan belanja pemerintah untuk merangsang permintaan agregat. Dalam konteks modern, kebijakan fiskal tidak hanya berfokus pada stabilisasi, tetapi juga pada redistribusi pendapatan dan pembangunan infrastruktur (Mankiw, 2019). instrumen utama (pajak, belanja pemerintah, dan defisit anggaran), serta perannya dalam stabilisasi ekonomi dan pertumbuhan. Penelitian seperti yang dilakukan Sevianti et al. (2025) menegaskan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui belanja infrastruktur dan reformasi perpajakan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2025 juga menegaskan peran kebijakan fiskal dalam akselerasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Tujuan utama kebijakan fiskal adalah menciptakan stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan jangka panjang, dan mengurangi ketimpangan sosial. Secara rinci, kebijakan ini bertujuan untuk: (1) mengendalikan inflasi melalui pengaturan pajak dan belanja negara, (2) mengurangi pengangguran dengan meningkatkan investasi publik, dan (3) mendistribusikan pendapatan secara lebih adil melalui program subsidi dan bantuan sosial. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2010), kebijakan fiskal ekspansif (seperti pemotongan pajak atau peningkatan belanja) sering digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan kontraktif (seperti kenaikan pajak) diterapkan untuk menekan inflasi. Selain itu, kebijakan fiskal juga berperan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) melalui alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan lingkungan (IMF, 2021).

Dalam pencatatan akuntansi pemerintah, kebijakan fiskal dicatat melalui jurnal anggaran dan realisasi belanja. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan anggaran belanja infrastruktur sebesar Rp10 triliun, jurnal yang dibuat adalah: "Debit: Belanja Modal Rp10 triliun; Kredit: Perkiraan Pendapatan Rp10 triliun". Saat realisasi pembayaran terjadi, jurnalnya menjadi: "Debit: Utang Pembangunan Rp10 triliun; Kredit: Kas Rp10 triliun". Menurut Bastian (2006), pencatatan ini mengikuti prinsip akrual untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Selain itu, laporan keuangan pemerintah (LKPP) harus mencerminkan dampak kebijakan fiskal melalui neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas sesuai standar SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

2.2 Implementasi Kebijakan Fiskal

Implementasi kebijakan fiskal seringkali dilakukan melalui stimulus ekonomi, terutama dalam menghadapi resesi atau krisis. Pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk proyek infrastruktur, memberikan insentif pajak, atau memperluas program bantuan sosial guna mendorong permintaan agregat. Contoh nyata adalah paket stimulus fiskal selama pandemi COVID-19, di mana banyak negara, termasuk Indonesia, meningkatkan belanja kesehatan dan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat terdampak

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Menurut Blanchard (2021), kebijakan fiskal ekspansif seperti ini efektif dalam memulihkan ekonomi karena langsung meningkatkan daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Namun, implementasinya harus disertai pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran anggaran dan inefisiensi.

Selain belanja pemerintah, kebijakan fiskal juga diimplementasikan melalui reformasi perpajakan, seperti penyesuaian tarif pajak, tax amnesty, atau pemberian keringanan pajak untuk sektor tertentu. Misalnya, pemerintah Indonesia menerapkan tax holiday untuk menarik investasi asing dan tax allowance bagi industri padat karya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021). Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), sistem pajak progresif dapat menjadi alat redistribusi pendapatan yang efektif jika dikelola dengan transparan. Namun, tantangan utama dalam implementasinya adalah menghindari penghindaran pajak (tax avoidance) dan memastikan kepatuhan wajib pajak. Studi OECD (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak, seperti e-filing dan e-billing, dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak sekaligus mengurangi celah korupsi.

Evaluasi implementasi kebijakan fiskal dilakukan melalui analisis multiplier effect belanja pemerintah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pembangunan jalan tol Trans-Jawa didanai melalui APBN terbukti meningkatkan PDB regional dan menurunkan biaya logistik (Bappenas, 2019). Namun, kebijakan fiskal juga berisiko menyebabkan defisit anggaran jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Menurut Reinhart dan Rogoff (2010), defisit yang berkelanjutan dapat memicu krisis utang, seperti yang terjadi di Yunani pada 2009. Oleh karena itu, implementasi kebijakan fiskal harus mempertimbangkan sustainability anggaran, salah satunya melalui penerapan aturan fiscal deficit ceiling (batas maksimal defisit), seperti yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

2.3 Tantangan Kebijakan Fiskal

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan fiskal adalah kurangnya political will dan koordinasi antarlembaga pemerintah. Kebijakan fiskal seringkali terhambat oleh kepentingan politik jangka pendek, seperti kebijakan populis yang tidak berkelanjutan atau penundaan reformasi struktural karena pertimbangan elektoral (Alesina & Passalacqua, 2016). Misalnya, pengurangan subsidi BBM yang diperlukan untuk mengalokasikan anggaran ke sektor produktif sering ditunda karena dikhawatirkan memicu protes masyarakat. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan belanja fiskal kerap tidak optimal, menyebabkan tumpang tindih program atau penyerapan anggaran yang lambat (World Bank, 2020). Tantangan ini memerlukan kerangka kelembagaan yang kuat dan komitmen bipartisan untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif. Tantangan kebijakan fiskal antara lain adalah

2.3.1 Keterbatasan Fiskal

Keterbatasan ruang fiskal (*fiscal space*) menjadi tantangan serius, terutama di negara berkembang dengan basis pajak yang sempit dan ketergantungan pada utang. Peningkatan belanja fiskal untuk stimulus ekonomi, seperti selama pandemi COVID-19, telah menyebabkan defisit anggaran membengkak di banyak negara, termasuk Indonesia yang defisitnya melebihi batas UU Keuangan Negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Menurut IMF (2022), defisit yang berkepanjangan dapat meningkatkan kerentanan ekonomi terhadap gejolak pasar global, seperti kenaikan suku bunga Fed yang memperberat pembayaran utang luar negeri. Selain itu, ketergantungan pada pendapatan komoditas (seperti minyak dan gas) membuat kebijakan fiskal rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, seperti yang terjadi pada krisis 2014-2016 ketika harga minyak dunia anjlok (Frankel, 2019).

2.3.2 Efesiensi Belanja dan Korupsi

Tantangan lain adalah memastikan belanja fiskal tepat sasaran dan bebas dari inefisiensi serta korupsi. Studi Transparency International (2021) menunjukkan bahwa sekitar 20-30% anggaran infrastruktur di negara berkembang hilang akibat korupsi atau salah kelola. Di Indonesia, meski belanja infrastruktur meningkat signifikan, kualitas proyek seperti jalan atau bendungan sering dikritik karena pembangunannya lambat atau tidak sesuai standar (BPKP, 2022). Selain itu, program bantuan sosial (bansos) kerap salah sasaran akibat data penerima yang tidak akurat. Menurut Gupta et al. (2002), inefisiensi belanja publik tidak hanya mengurangi dampak kebijakan fiskal tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Digitalisasi sistem pengadaan dan pendataan, seperti penggunaan SIAP dan DTKS di Indonesia, menjadi solusi parsial, tetapi memerlukan pengawasan independen.

2.3.3 Dinamika Ekonomi Global

Kebijakan fiskal juga menghadapi tantangan dari dinamika ekonomi global yang tidak terduga, seperti krisis finansial, pandemi, atau konflik geopolitik. Misalnya, Perang Ukraina 2022 memicu lonjakan harga energi dan pangan, memaksa banyak negara mengalihkan anggaran fiskal untuk subsidi darurat (OECD, 2022). Selain itu, normalisasi kebijakan moneter global (seperti kenaikan suku bunga AS) memperketat likuiditas dunia, menyulitkan pembiayaan defisit fiskal melalui utang luar negeri. Menurut Stiglitz (2020), ketidakpastian global memerlukan kebijakan fiskal yang fleksibel dengan *buffer* seperti dana

stabilisasi (*stabilization fund*) dan diversifikasi pendanaan. Namun, hal ini sulit diimplementasikan di negara dengan kapasitas fiskal terbatas.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali secara mendalam fenomena kebijakan fiskal dan manajemen utang publik dalam konteks era globalisasi, khususnya pada periode 2021–2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas kebijakan ekonomi makro yang dipengaruhi oleh faktor domestik dan global secara simultan. Penelitian kualitatif memberikan ruang bagi analisis reflektif terhadap data yang bersifat kontekstual dan dinamis, sesuai dengan karakteristik isu yang dikaji.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menelaah secara spesifik kebijakan fiskal dan pengelolaan utang publik di Indonesia dalam periode tertentu. Studi kasus dipilih agar dapat memberikan gambaran yang lebih rinci dan kontekstual mengenai tantangan dan peluang kebijakan dalam menghadapi dinamika global. Studi kasus ini menggabungkan data sekunder dari dokumen pemerintah, laporan lembaga keuangan internasional, dan publikasi akademik sebagai sumber utama.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif-analitis dan analisis SWOT. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran empiris terkait kebijakan fiskal dan profil utang negara. Sementara itu, analisis SWOT dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pengelolaan utang publik. Dengan analisis ini, peneliti dapat mengevaluasi posisi strategis Indonesia dalam mengelola kebijakan fiskalnya di tengah tekanan eksternal.

3.4 Pemodelan Simulatif

Untuk melengkapi hasil analisis kualitatif dan memperkirakan dampak kebijakan ke depan, penelitian ini juga menerapkan pendekatan simulasi dinamika sistem (system dynamics modeling). Model ini digunakan untuk memproyeksikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan berbagai skenario kebijakan dan asumsi global, seperti perubahan suku bunga internasional, fluktuasi nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi domestik. Pemodelan ini memberikan gambaran skenario alternatif yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kekuatan (*Strengths*) Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Utang Publik

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sejumlah kekuatan mendasar dalam kebijakan fiskal dan pengelolaan utang publik, yang menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

4.1.1 Rasio Utang yang Terkendali

Salah satu kekuatan utama adalah posisi rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih berada dalam batas aman. Hingga akhir 2023, rasio utang pemerintah Indonesia tercatat sekitar 38,2%, masih di bawah ambang batas kritis sebesar 60% sesuai ketentuan Maastricht Treaty, dan jauh di bawah batas aman yang diterapkan banyak negara berkembang. Kondisi ini mencerminkan tingkat kehati-hatian fiskal pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang.

4.1.2 Diversifikasi Sumber Pembiayaan

Pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber utang. Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi rupiah yang dominan menunjukkan upaya mengurangi risiko nilai tukar dan memperkuat ketahanan pasar domestik. Selain itu, kerja sama pembiayaan dengan lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IMF, dan Asian Development Bank (ADB) menambah fleksibilitas fiskal serta meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata investor global (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

4.1.3 Kerangka Regulasi yang Kuat dan Adaptif

Kebijakan fiskal Indonesia berlandaskan pada sistem hukum yang relatif kuat dan adaptif terhadap krisis. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi landasan utama dalam pengelolaan fiskal, sementara UU No. 1 Tahun 2020 memberikan ruang fleksibilitas dalam menghadapi

krisis COVID-19. Kerangka ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pelebaran defisit fiskal secara temporer tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian fiskal.

4.1.4 Fokus pada Pembangunan Jangka Panjang

Penggunaan utang publik difokuskan untuk belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mendorong transformasi ekonomi jangka panjang. Studi Blanchard (2021) menekankan bahwa utang dapat bersifat produktif selama digunakan untuk investasi yang memberikan pengembalian sosial dan ekonomi lebih besar dari biaya pinjaman.

4.1.5 Kredibilitas Fiskal dan Komitmen terhadap Reformasi

Kredibilitas fiskal Indonesia juga tercermin dalam komitmen untuk kembali pada disiplin fiskal pasca pandemi. Pemerintah telah menargetkan penurunan defisit fiskal ke bawah 3% terhadap PDB mulai tahun 2023, sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara. Komitmen ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan menstabilkan ekspektasi pelaku ekonomi terhadap kebijakan fiskal jangka menengah.

4.1.6 Dukungan Institusi dan Kapasitas Manajerial

Lembaga-lembaga pengelola fiskal dan utang seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia menunjukkan sinergi yang relatif baik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Modernisasi sistem pengelolaan kas negara, transparansi pelaporan utang, serta sistem manajemen risiko fiskal yang berbasis teknologi informasi juga menjadi faktor penunjang kekuatan institusional.

4.2 Kelemahan (*Weaknesses*) dalam Pengelolaan Fiskal dan Utang Publik

Penelitian ini mengungkap bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam pengelolaan fiskal Indonesia adalah rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang hanya berkisar di angka 10% dalam beberapa tahun terakhir. Rasio ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, seperti Thailand atau Vietnam, yang memiliki rasio di atas 15%. Rendahnya tax ratio ini memperlihatkan lemahnya basis perpajakan nasional dan tingginya ketergantungan pada sektor-sektor informal yang sulit dipungut pajaknya. Kondisi ini berimplikasi langsung pada terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai pembangunan nasional tanpa harus meningkatkan utang.

Selain itu, keterlambatan dalam penyerapan anggaran, terutama di tingkat pemerintah daerah, menjadi penghambat signifikan terhadap efektivitas stimulus fiskal. Data menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di beberapa provinsi masih berada di bawah 80% hingga triwulan ketiga, menyebabkan alokasi belanja tidak maksimal dan berdampak pada lambatnya realisasi program pembangunan dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Faktor-faktor seperti kapasitas perencanaan yang rendah, birokrasi yang rumit, serta koordinasi antarlembaga yang lemah turut memperburuk situasi ini.

Kelemahan lain yang tak kalah penting adalah beban biaya layanan utang (*debt servicing*), yang terus meningkat dan mencapai sekitar 20% dari total belanja negara. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kombinasi antara suku bunga global yang tinggi dan peningkatan jumlah utang jangka menengah-panjang yang jatuh tempo. Alokasi anggaran yang besar untuk membayar bunga dan pokok utang mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah dalam mendanai sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur produktif.

Di sisi tata kelola, fragmentasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan berbagai tumpang tindih program serta pemborosan anggaran. Contohnya, proyek infrastruktur yang seharusnya mendukung konektivitas antardaerah sering mengalami penundaan akibat konflik regulasi perizinan, perbedaan prioritas, atau minimnya koordinasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem perencanaan dan pengawasan yang terintegrasi antara pusat dan daerah.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret untuk memperkuat kapasitas kelembagaan fiskal, mulai dari reformasi sistem perpajakan (seperti digitalisasi pajak dan ekstensifikasi basis pajak), peningkatan kualitas belanja, hingga pembenahan arsitektur fiskal nasional agar lebih adaptif terhadap tantangan global dan efisien dalam pelaksanaan anggaran. Tanpa pembenahan mendasar terhadap kelemahan ini, keberlanjutan fiskal dan efektivitas pengelolaan utang publik Indonesia akan terus menghadapi tekanan dalam jangka panjang.

4.3 Peluang (Opportunities) dalam Konteks Globalisasi

Dalam konteks globalisasi, Indonesia memiliki peluang strategis untuk memperkuat pengelolaan fiskal dan utang publik melalui pemanfaatan berbagai instrumen dan kerja sama internasional. Salah satu peluang utama adalah pengembangan *pembiayaan inovatif* seperti *green bonds* dan *blended finance*. Green bonds, yang mengacu pada instrumen utang yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, telah menjadi bagian dari tren global yang semakin diperkuat oleh komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dan Paris Agreement. Indonesia telah mulai mengimplementasikan hal ini melalui penerbitan *Green Sukuk*, yang mendapat respon positif dari pasar global. Pendekatan ini tidak hanya mendiversifikasi sumber pembiayaan, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap keberlanjutan (OECD, 2023).

Selain itu, kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara G20 dan lembaga keuangan internasional seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank membuka peluang untuk memperoleh pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih panjang. Skema ini sangat penting dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis, terutama yang berkaitan dengan transisi energi dan mitigasi perubahan iklim, seperti proyek energi terbarukan dan sistem transportasi berkelanjutan. Pendanaan ini cenderung lebih stabil dan fleksibel dibandingkan utang pasar komersial.

Di sisi lain, kemajuan teknologi digital telah menciptakan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas fiskal. Digitalisasi sistem perpajakan dan bea cukai melalui integrasi platform seperti SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online) dan INSW (Indonesia National Single Window) dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses administrasi, serta memperluas basis penerimaan negara. Digitalisasi ini juga membuka ruang untuk *real-time monitoring* dan *data analytics* guna mendeteksi potensi kebocoran anggaran, yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab inefisiensi fiskal.

Lebih lanjut, adopsi teknologi blockchain dalam manajemen utang publik juga mulai dipertimbangkan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Penggunaan blockchain dapat meningkatkan kepercayaan investor melalui pencatatan transaksi yang transparan, tidak dapat diubah, dan mudah dilacak. Teknologi ini dapat digunakan dalam proses penerbitan, pelunasan, dan audit surat utang negara secara otomatis dan terintegrasi, yang berpotensi menurunkan biaya administrasi dan risiko manipulasi data (IMF, 2023).

Secara keseluruhan, peluang-peluang tersebut, jika dirancang dalam kerangka kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan, dapat memperkuat posisi fiskal Indonesia, mengurangi ketergantungan pada utang konvensional, dan mempercepat transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.

4.4 Ancaman (*Threats*) dari Ketidakpastian Global

Ancaman utama dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan utang publik pada era globalisasi bersumber dari dinamika eksternal yang sangat volatil. Kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed menyebabkan terjadinya capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berdampak pada depresiasi nilai tukar rupiah. Depresiasi ini secara langsung meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri, terutama yang berdenominasi dolar AS, dan turut memperbesar risiko fiskal. Selain itu, kondisi geopolitik global seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah juga memperburuk kestabilan harga komoditas global, terutama energi dan pangan. Ketergantungan Indonesia terhadap impor dua sektor ini membuat APBN rentan terhadap tekanan inflasi yang bersifat eksternal. Hal ini menuntut kebijakan fiskal untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan global, termasuk melalui mekanisme *counter-cyclical fiscal policy* dan fleksibilitas dalam alokasi belanja negara.

Lebih jauh, ketidakpastian global turut meningkatkan tekanan terhadap struktur fiskal melalui penurunan penerimaan negara dari sektor ekspor akibat perlambatan ekonomi mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Kondisi ini mengancam ketersediaan ruang fiskal untuk program-program prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, ketergantungan pada pinjaman luar negeri untuk menutup defisit anggaran membuat Indonesia berisiko terpapar pada persyaratan ketat dari lembaga internasional, seperti pengurangan belanja sosial atau subsidi dalam bentuk *austerity policy*. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pencapaian target pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi mitigasi seperti diversifikasi pembiayaan, peningkatan cadangan devisa, serta penguatan fundamental ekonomi domestik melalui hilirisasi industri dan substitusi impor menjadi langkah yang krusial untuk menjaga ketahanan fiskal nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis *SWOT*, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal dan pengelolaan utang publik Indonesia di era globalisasi menghadapi tantangan kompleks namun juga menawarkan peluang strategis. Di satu sisi, kekuatan seperti stabilitas makroekonomi, kerangka hukum yang kuat, dan diversifikasi pembiayaan (termasuk SUN dan kerja sama multilateral) menjadi fondasi penting. Namun, kelemahan struktural seperti rendahnya rasio pajak terhadap PDB (10%), inefisiensi belanja negara, dan fragmentasi kebijakan pusat-daerah menghambat optimalisasi kebijakan fiskal. Di tengah ketidakpastian global—seperti gejolak pasar keuangan, risiko nilai tukar, dan tekanan suku bunga—peluang pembiayaan inovatif (*green bonds, blended finance*) dan digitalisasi sistem fiskal dapat menjadi solusi jika dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas. Temuan kritis penelitian ini menegaskan perlunya rekomendasi kebijakan terpadu: (1) reformasi perpajakan untuk memperluas basis penerimaan, (2) penguatan tata kelola utang berbasis risiko melalui strategi *hedging* dan diversifikasi kreditur, serta (3) peningkatan sinergi pusat-daerah untuk memaksimalkan dampak belanja publik. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menjaga

keberlanjutan fiskal sekaligus memanfaatkan peluang globalisasi untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan stabilitas ekonomi jangka panjang, sesuai visi Indonesia Emas 2045.

5.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, studi selanjutnya direkomendasikan untuk menggali lebih dalam efektivitas kombinasi kebijakan fiskal dan strategi manajemen utang dalam menghadapi guncangan global secara kuantitatif menggunakan pemodelan makroekonomi dinamis berbasis data panel antarnegara. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan skenario simulasi yang lebih spesifik terhadap kebijakan fiskal hijau dan pembiayaan inovatif seperti green sukuk dan carbon pricing, serta menganalisis implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendekatan ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih presisi dan kontekstual bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal yang tangguh terhadap ketidakpastian global.

REFERENSI

Alesina, A. & Passalacqua, A. (2016). *The Political Economy of Government Debt*. NBER.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2022). *Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Infrastruktur Nasional Tahun 2021*. Jakarta: BPKP.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Strategis: Studi Kasus Jalan Tol Trans-Jawa*. Jakarta: Bappenas.

Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, Penerbit Erlangga.

Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics*. Pearson.

Detik Finance. (2024). *Strategi Pengelolaan Utang Publik dan Kebijakan Fiskal Indonesia*. Artikel yang membahas strategi pemerintah dalam pengelolaan utang dan kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian global.

Frankel, P. H. (2019). The Changing Structure of the Oil Industry. In *The Oil Market In The 1990s* (pp. 35-45). Routledge.

Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. R. (2002). The effectiveness of government spending on education and health care in developing and transition economies. *European Journal of Political Economy*, *18*(4), 717-737.

International Monetary Fund (IMF). (2021). *Fiscal Policy and Sustainable Growth*.

International Monetary Fund (IMF). (2022). *Fiscal Monitor: Managing Public Wealth*. Washington, D.C.: IMF.

International Monetary Fund (IMF). (2023). *Blockchain Consensus Mechanisms and Their Role in Public Debt Management*. Washington, D.C.: IMF. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Pelaksanaan APBN 2020: Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta – Edisi Desember 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Strategi Pembiayaan APBN 2023: Mengelola Risiko dan Menjaga Keberlanjutan Fiskal*. Jakarta: Kemenkeu RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025*. Dokumen resmi yang menguraikan arah kebijakan fiskal Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan domestik.

Mabbruroh, I., Lentina, U., Firnanda, Y., & Noviarita, H. (2023). Analisis Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, *1*(2), 236-241.

Mankiw, G. (2019). *Macroeconomics*. Worth Publishers.

Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill.

Nugraha, D. W., & Theodora, A. (2025). Defisit APBN Tahun 2025 Diproyeksi Membengkak, Bagaimana Bisa? Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/defisit-apbn-tahun-2025-diproyeksi-membengkak-bagaimana-bisa

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). SMEs in the Digital Economy: Taxation and Policy Recommendations. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Sovereign Borrowing Outlook 2023*. Paris: OECD Publishing.

Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Pramesti, R. F., Firdaus, A. A., Yulita, K., & Thoyyibah, M. (2025). Analisis Efisiensi Apbn Era Prabowo:

Kajian Ekonomi Dan Analisis Sentimen Publik. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, *8*(2), 1147-1161.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a Time of Debt. *American economic review*, *100*(2), 573-578.Samuelson, P. & Nordhaus, W. (2010). *Economics*. McGraw-Hill.

Sevianti, S., Darmawati, D., Arkaan, A. B., & Yulianto, H. (2025). Tinjauan Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020-2023. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *2*(2), 4196-4207.

Stiglitz, J. E. (2020). *Globalization and Its Discontents Revisited*. W.W. Norton.

Transparency International. (2021). *Corruption in Infrastructure Projects: The Risks and How to Manage Them*. Berlin: Transparency International.

Wildan, M. (2025). Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$427 Miliar, Tumbuh 4,7 Persen. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810167/utang-luar-negeri-indonesia-tembus-us427-miliar-tumbuh-47-persen.

World Bank. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review: Towards a More Effective Government Spending*. Washington, D.C.: The World Bank.